

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga.
- BPKP. (2007). *Akuntabilitas instansi pemerintah BPKP 2007*.
- DEPUTI IV BPKP. (2005). *Pedoman Penyusunan Apbd Berbasis Kinerja* (pp. 1–64).
- Faisal, D. (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya*.
- Jogiyanto. (2009). *Konsep dan aplikasi PLS (partial least square) untuk penelitian empiris*.
- Kumorotomo, W. (2012). Teknik Penganggaran Untuk Perencanaan Sosial. *21st Century Economics: A Reference Handbook*, 1–13. <https://doi.org/10.4135/9781412979290.n25>
- LAN RI. (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (pp. 2–43).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik (Pertama)*. ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.
- MENDAGRI. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Vol. No. 655 (Issue 879, pp. 1–244)*.
- MENDAGRI. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (pp. 1–445).
- MENPAN-RB RI. (2010). *Permen Pan-Rb Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (pp. 1–27).
- MENPAN-RB RI. (2014). *Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (pp. 1–29).
- Nuryanti, R. (2019). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung*. 2019.

- Presiden RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah* (pp. 1–68).
- Presiden RI. (2014a). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). In *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* (pp. 1–44). <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Presiden RI. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (pp. 1–460).
- Richard Mulgan. (2000). ‘Accountability’: An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/richard_mulgan/MulganR_02.pdf
- Saputra, E. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung*.
- Seatur Asih, D. (2018). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang*. 372(2), 2499–2508.
- Selviani, D. (2018). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi*.
- Ulfa. (2019). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Aceh*.
- Yuni, R. (2021). *Inspektorat Pesawaran Diduga Bermain Mata Dengan Kades Tanjung Agung*. www.Rumahberita.Co.Id. <https://rumahberita.co.id/inspektorat-pesawaran-diduga-bermain-mata-dengan-kades-tanjung-agung/>